

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis peran *stakeholder* terhadap pemberdayaan Posbindu PTM, dapat disimpulkan:

1. Stakeholder yang berperan pada proses pembentukan dan persiapan pelaksanaan Posbindu PTM adalah: puskesmas, kader, sebagian kepala kelurahan/kepala desa, dan ketua rukun tetangga/kepala dusun. Monitoring dan evaluasi yang berperan puskesmas dan kader. Masyarakat yang anggota Posbindu PTM mendapat manfaat karena dapat mendeteksi, mencegah, mengendalikan, dan mengobati PTM sehingga ingin datang setiap bulan ke Posbindu PTM. Sementara, ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya Posbindu PTM. Namun, setelah diberi sosialisasi mereka mengatakan ingin datang ke Posbindu PTM. Peran stakeholder pada proses pembentukan, persiapan pelaksanaan tidak ada hubungan dengan cakupan Posbindu PTM, sedangkan pada monitoring dan evaluasi peran stakeholder ada hubungannya dengan cakupan Posbindu PTM.
2. Formulasi peningkatan peran stakeholder pada pemberdayaan Posbindu PTM dapat dikelola dengan cara mengoptimalkan tugas, fungsi, kewenangan stakeholder dan menguraikan peran dengan mitra kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Stakeholder yang terlibat mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi, TP PKK provinsi sampai TP PKK kelurahan/desa, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, puskesmas, BPJS Kesehatan, forum kabupaten/kota sehat, kepala kecamatan, kelurahan, ketua rukun tetangga.
3. Model pemberdayaan Posbindu PTM dengan meningkatkan peran *stakeholder*, penggerak PKK mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan/desa, forum kabupaten/kota sehat, kepala kecamatan, kepala kelurahan, ketua rukun tetangga, BPJS Kesehatan, karena mempunyai tugas dan fungsi, sumber daya, mitra kerja, indikator kinerja untuk memberdayakan masyarakat. Model peran *stakeholder* mulai dari proses pembentukan, persiapan pelaksanaan dan monitoring evaluasi.
4. Analisis peran *stakeholder* terhadap pemberdayaan Posbindu PTM dapat menghasilkan :
 - 1) Model peningkatan pengetahuan tentang Posbindu PTM dan PTM kepada masyarakat dengan meningkatkan peran *stakeholder*; dan
 - 2) Model pelayanan promotif, preventif, dan kuratif yang terintegrasi dalam upaya melakukan deteksi dini, mencegah dan mengendalikan PTM dengan meningkatkan peran *stakeholder*.

Saran

1. Bagi *Stakeholder*

- 1) Dinas Kesehatan Kabupaten/kota melakukan ;
 - a) Sosialisasi, advokasi dan koordinasi kepada Forum Kabupaten/kota Sehat, Penggerak PKK Kabupaten/kota untuk menggerakkan masyarakat;
 - b) Melakukan monitoring dan pembinaan kepada Puskesmas dan Kader, agar dapat meningkatkan cakupan pelaksanaan Posbindu PTM;
- 2) Penggerak PKK Kabupaten melakukan pembinaan kepada PKK Kecamatan dan koordinasi dengan Forum Kota/Kabupaten Sehat, Dinas Kesehatan Kabupaten/kota untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Posbindu PTM,
- 3) Forum kabupaten/kota sehat melakukan advokasi kepada bupati/walikota untuk dapat membuat program/kebijakan pemberdayaan Posbindu PTM, dan terkoordinasi dengan TP PKK kabupaten untuk melakukan pembinaan kepada PKK kecamatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota untuk meningkatkan pengetahuan tentang Posbindu PTM,
- 4) Puskesmas melakukan koordinasi dengan kepala kecamatan, forum kecamatan sehat, TP PKK Kecamatan dan instansi lain, serta melakukan pembinaan kader untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Posbindu PTM dan PTM melalui lokakarya lintas sektor dan kegiatan lain;
- 5) Kepala kecamatan melakukan koordinasi dengan forum kecamatan sehat, TP PKK kecamatan dan instansi lain, serta melakukan pembinaan kepada kepala kelurahan/desa, ketua rukun tetangga dan kader untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Posbindu PTM dan PTM melalui lokakarya lintas sektor. Kepala kecamatan bersama kepala kelurahan/kepala desa dapat melakukan upaya peningkatan pengetahuan dalam setiap kegiatan yang mengumpulkan masyarakat, seperti penyusunan rencana kerja desa, saat pembagian subsidi dan musyawarah lainnya;
- 6) Kepala kelurahan melakukan koordinasi dengan forum kecamatan sehat, TP PKK kelurahan, serta melakukan pembinaan kepada rukun tetangga/ketua dusun dan kader untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Posbindu PTM;
- 7) Ketua rukun tetangga/kepala dusun bersama kader lebih aktif melakukan sosialisasi Posbindu PTM kepada masyarakat;

- 8) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan agar menjadikan Posbindu PTM sebagai program pengembangan dari Prolanis untuk meningkatkan cakupan kepada seluruh peserta, tidak hanya yang sudah menderita PTM;
- 9) Kantor Kesehatan Pelabuhan berkoordinasi dengan instansi di lingkungan pelabuhan dan kelurahan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PTM dan Posbindu PTM; dan
- 10) Institusi pendidikan kesehatan menjadikan Posbindu PTM sebagai wadah pengabdian bagi mahasiswa dan dosen. Upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa untuk menggerakkan *stakeholder* dalam memberdayakan Posbindu PTM dan masyarakat untuk memanfaatkan Posbindu PTM serta melatih Kader.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

1) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

- a) Melaksanakan dan mengembangkan model Posbindu PTM terintegrasi, yaitu pelayanan promotif, preventif, dan kuratif dasar dalam upaya melakukan deteksi dini, mencegah, dan mengendalikan penyakit tidak menular;
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan puskesmas perlu melakukan penguatan forum kabupaten/kota sehat, TP PKK kabupaten, TP PKK kecamatan, kepala kecamatan, kepala kelurahan/kepala desa, ketua rukun tetangga/kepala dusun untuk menambah pengetahuan dan keterampilan tentang deteksi dini dalam kegiatan Posbindu PTM dan melalui kolaborasi antar *stakeholder* agar mendukung pemberdayaan Posbindu PTM.
- c) Dinas kesehatan perlu menyusun indikator keberhasilan Posbindu PTM yang dapat dilaksanakan oleh *stakeholder* antara lain: keterlibatan *stakeholder* pada pelaksanaan dan monitoring evaluasi merupakan kontribusi *stakeholder* terhadap keberhasilan pada suatu kerja *stakeholder*.
- d) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu menyusun buku panduan Posbindu PTM. Buku tersebut dapat digunakan secara praktis bagi masyarakat umum dan kepala desa, TP PKK, ketua rukun tetangga/kepala dusun, sehingga memudahkan kader, *stakeholder* dan masyarakat untuk memahami, melaksanakan Posbindu PTM, mencegah PTM guna mencegah dan mengendalikan PTM.

- e) Dinas kesehatan dapat berkolaborasi dengan institusi pendidikan kesehatan dengan mengajak mahasiswa dan tenaga pengajar untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pemberdayaan Posbindu PTM.

2) Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

BPJS Kesehatan mempunyai kewenangan untuk menentukan mutu puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. BPJS Kesehatan menetapkan salah satu indikator mutu puskesmas adalah kontak rate dan kunjungan peserta Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis). Indikator kontak rate adalah kunjungan sakit dan kunjungan sehat, sehingga Puskesmas harus melakukan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kunjungan sehat, seperti Posbindu PTM yang bertujuan mencegah dan mengendalikan PTM. BPJS Kesehatan dapat mengembangkan Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) tidak hanya bagi peserta yang sudah menderita, tetapi juga bagi peserta yang masih sehat sehingga dapat berintegrasi dengan kegiatan Posbindu PTM untuk meningkatkan kunjungan.

3) Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat mendeteksi dini, mencegah, dan mengendalikan PTM dengan cara mengikuti kegiatan dan menerapkan perilaku hidup sehat sesuai dengan anjuran pada penyuluhan atau konseling saat pelaksanaan Posbindu PTM .

Novelty Penelitian

Novetly hasil penelitian dengan melakukan evaluasi penyelenggaraan terhadap pemberdayaan Posbindu PTM dengan peningkatan peran *stakeholder* dalam upaya meningkatkan kemauan masyarakat melakukan deteksi dini, mencegah, dan mengendalikan PTM adalah sebagai berikut :

- a. Model pemberdayaan Posbindu PTM dengan peningkatan peran *stakeholder* dalam upaya meningkatkan kemauan masyarakat melakukan deteksi dini, mencegah dan mengendalikan PTM;
- b. Model peningkatan pengetahuan tentang Posbindu PTM dan PTM kepada masyarakat; dan
- c. Model pelayanan promotif, preventif, dan kuratif yang terintegrasi dalam upaya melakukan deteksi dini, mencegah, dan mengendalikan penyakit tidak menular.

Implikasi

Novelty penelitian ini dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia karena: mempunyai struktur pemerintahan yang sama, perilaku hidup sehat relatif sama, mempunyai kebudayaan yang mendukung kegiatan kelompok/bersama-sama, peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang sama dalam memberdayakan masyarakat. Implementasi ketiga model ini dapat diterapkan dalam upaya melakukan deteksi dini, mencegah, dan mengendalikan PTM;

